



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU

Nomor : W.4-HH.04.02 - 1793

Nomor : P.100.3.7.1/DPMPTSP-S /215 /2024

TENTANG
PELAYANAN HUKUM DI WILAYAH

Pada hari ini Selasa tanggal 20 (Dua Puluh) bulan Februari tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:

- | | |
|---|---|
| 1. BUDI ARGAP SITUNGKIR,
A.Md.I.P., S.H., M.H. | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 233 Pekanbaru, Riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Untuk selanjutnya disebut Pihak I ; |
| 2. H. AKMAL KHAIRI, S.T.H.I.,
M.H. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, yang berkedudukan dan berkantor di Kota Pekanbaru, beralamat di Jl Jend. Sudirman No.464 Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut Pihak II . |

Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** Secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah satu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah satu unit kedinasan Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru serta membantu tugas pemerintahan melaksanakan urusan di Bidang Pelayanan Hukum.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

3. Bahwa Para Pihak menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi Para Pihak dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan Para Pihak.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 242);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 243);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5922);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5953);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Perseroan Terbatas, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
25. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Terbatas (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 470);

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

26. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1441);
27. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menunjang dalam melaksanakan pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat di DPMPTSP Kota Pekanbaru, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di Bidang Pelayanan Hukum dan meningkatkan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru serta Pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem AHU Online terutama untuk meningkatkan permohonan Perseroan Perorangan dan sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual serta meningkatkan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pelayanan Hukum yang dimiliki Ditjen Kemenkumham;
- b. Pertukaran data dan informasi di Bidang Pelayanan Hukum;
- c. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perseorangan;
- d. Pertukaran data dan informasi berkenaan dengan kebijakan, potensi, peluang, promosi, pengawasan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pertukaran inovasi teknologi informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan penerapannya;
- f. Fasilitasi kegiatan promosi pada event-event promosi di daerah dan Pelaksanaan kegiatan matchmaking/kemitraan usaha antara pelaku usaha;
- g. Peningkatan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum Dan Peningkatan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru;
2. PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyeleenggraan Pelayanan Hukum di Wilayah dan Peningkatan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru;
3. PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pelayanan Hukum di wilayah dan Peningkatan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru;
4. PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK I berkewajiban:

- a. Menyediakan Materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman pada layanan Administrasi Hukum Umum bagi pelaku usaha dan layanan Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan permohonan pendaftaran baik pada layanan Perseroan Perorangan maupun layanan Kekayaan Intelektual;
- c. Memberikan data dan informasi mengenai layanan ;
- d. Memberikan pelayanan pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan

PIHAK II berkewajiban:

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di layanan Administrasi Hukum Umum bagi pelaku usaha;
- c. Memberikan dukungan anggaran, administrasi persuratan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- d. Memberikan dukungan dalam penerapan inovasi teknologi informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Pasal 5
HAK

PARA PIHAK berhak:

- a. Mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/ atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman pada layanan Administrasi Hukum Umum bagi pelaku usaha dan layanan Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan, peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi mengenai layanan;
- d. Menerima data dan informasi berkenaan dengan kebijakan, potensi, peluang, promosi, pengawasan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Memperoleh dukungan dalam penerapan inovasi teknologi informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Mendapatkan fasilitasi dalam Peningkatan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan kerja sama antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak dengan persetujuan dari para pihak ;
2. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure)

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

- a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau kebijakan pemerintah;
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.
3. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disekepalakan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama.

**Pasal 9
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RIAU,



BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md.I.P., S.H., M.H

NIP. 197510211998031001

PIHAK II

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU,



H. AKMAL KHAIRI, S.T.H.I., M.H,

NIP. 197704172003121004